



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/496/KEP/17/2018

TENTANG

DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, perlu Keputusan Bupati tentang Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.
Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR:180.182/496 /KEP/17/2018
 TENTANG
 DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				PENENTU KEBIJAKAN	PELAKSANA KEBIJAKAN	PENGAWAS INTERNAL/ EKSTERNAL	PUBLIK	PENEGAK HUKUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 2	000 001	UMUM Lambang a. Garuda b. Bendera Kebangsaan c. Daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota) d. Bandir/Umbul-Umbul	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Umum/ SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
3	002	Tanda Kehormatan/Penghargaan (Khusus untuk Non PNS) a. Bintang b. Satyalencana c. Satyakarya Nugraha d. Penghargaan Secara Adat e. Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dan sebagainya)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Umum/ SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
4	003	Hari Raya/Besar a. Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSAN dan sebagainya) b. Keagamaan c. Hari Ulang Tahun/HUT (Hari Jadi Provinsi/Kabupaten/Kota)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Humas dan Protokol/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
5	004	Ucapan a. Terima Kasih b. Selamat c. Mohon Diri d. Bela Sungkawa e. Ucapan lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Umum/ SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	005	Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Umum/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
7	006	Tanda Jabatan a. Pamong Praja b. Pejabat lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Organisasi/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
8	010	URUSAN DALAM a. Gedung Kantor termasuk Instalasi meliputi: - listrik - telepon - otomasi - ari minum - hidrant - alarm b. Rumah Dinas c. Akomodasi/Persinggahan (Mess/Wisma/Hotel) d. Rumah Susun/Apartemen e. Peminjaman Sarana Prasarana Kantor (Ruangan, Gedung, Kendaraan, LCD, Laptop dan lain-lain) f. Pengurusan Kendaraan Dinas g. Keamanan/Ketertiban Kantor h. Kebersihan Kantor i. Protokol meliputi upacara bendera, pemasangan gambar presiden dan wakil presiden, audensi, dan penerimaan tamu j. Kerjasama keprotokolan	Biasa/Terbuka sda sda sda sda sda sda sda sda Biasa/Terbuka Terbatas	√ sda sda sda sda sda sda √ √	√ sda sda sda sda sda sda √ -	√ sda sda sda sda sda sda √ √	√ sda sda sda sda sda sda √ -	√ sda sda sda sda sda sda √ √	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda sda sda sda sda sda sda sda Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Setda, Bagian Umum/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum sda sda sda sda sda sda sda sda Setda, Bagian Humas dan Protokol/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum Setda, Bagian Humas dan Protokol/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
10	020	BARANG DAN JASA a. Penawaran - Penawaran Barang - Penawaran Jasa b. Barang	Rahasia	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Setda, Bagian Administrasi Pembangunan Daerah/BPPKAD, Bidang Aset/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Barang Bergerak - Barang Tidak Bergerak c. Jasa <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Perencanaan - Konsultan Pengawasan d. Pengadaan termasuk Pengumuman Pengadaan, Penunjukan, Lelang <ul style="list-style-type: none"> - Prakuualifikasi:Rapat Persiapan, HPS, Penjelasan Pekerjaan/ <i>Anwijzing</i> , Negosiasi, Evaluasi - SPK, Kontrak/Amandemen/ Addendum, Teguran - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) - Serah Terima Pekerjaan - Pemeriksaan Pekerjaan - Perpanjangan Waktu/<i>Force Majore</i> - Denda - Sanggahan - Pemeliharaan Barang/Jasa e. Inventaris <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Barang Milik Negara - Pemeliharaan Barang Milik Negara - Penghapusan Barang Milik Negara 								Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
11	030	KEKAYAAN DAERAH <ul style="list-style-type: none"> a. Barang-barang tidak Bergerak (Bumi) <ul style="list-style-type: none"> - Tanah - Perkebunan - Pertanian - Hutan - Tambak b. Barang-barang tidak Bergerak (Bangunan) <ul style="list-style-type: none"> - Gedung - Asrama - Monumen/Bangunan - Bangunan Lain c. Tanaman d. Alat-alat Berat e. Hewan f. Barang Persediaan dalam Gudang g. Alat Pengangkut (Darat, Laut, 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD Bidang Aset/ SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Udara) h. Peralatan Pabrik, Laboratorium i. Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan lain-lain)								
12	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/ KEARSIPAN/SANDI a. Perpustakaan - Pameran Bahan Pustaka - Pengolahan (Katalog, Bibliografi) - Sirkulasi/Layanan (keanggotaan, peminjaman dan pengembalian) - Deposit - Pemeliharaan, Pelestarian/ Alih Media - Pembinaan Perpustakaan (Bantuan Buku, Rak) - Penghapusan/ Penyusutan Bahan Perpustakaan - Jenis-Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, Perguruan Tinggi, Sekolah, Keliling, Masyarakat) - Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan b. Dokumentasi c. Kearsipan - Pola Klasifikasi - Akuisisi Arsip - Penataan - Penyusutan Arsip (Jadwal Retensi Arsip, Penilaian Arsip, Pemindahan Arsip, Penyerahan Arsip, Pemusnahan Arsip) - Pembinaan Kearsipan (Pengawasan, Bimbingan Kearsipan, Pembinaan Arsip)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dispuspa, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha dan Umum/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
			Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja pencipta arsip	Dispuspa, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian tata Usaha dan Umum/Pemerintah Desa, Bagian Tata usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip (Fumigasi, Termite Control, Laminasi, Alih Media) - Layanan - Pemasyarakatan (Bimbingan Teknis, Penerbitan Naskah Sumber Arsip, Sosialisasi Kearsipan, Pameran. Lomba) - Pengembangan Sistem (Sistem Kearsipan, Sistem Jaringan Informasi Kearsipan) <p>d. Sandi e. Telegram, Telex, Radio, ISB f. Data Elektronik</p>	Rahasia	√	-	√	-	√		
13	050	<p>PERENCANAAN meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementerian, Musrenbangnas, Musrenbangdes</p> <p>a. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - RENSTRA (Rencana Strategi) - RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) - RENSTRA BAPPEDA <p>b. Program Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKP (Rencana Kerja Pembangunan) - RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) - RKP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) - Rencana Kerja SKPD - KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) - Jawaban Gubernur atas Pandangan Fiskal 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Bappeda, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Nota Keuangan - RKT (Rencana Kerja Tahunan) - RKO (Rencana Kerja Operasional) c. Laporan <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Berkala - LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) d. Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Strategis (Evaluasi RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota, Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) 								
14	060	<p>ORGANISASI/KETATALAKSANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi <ul style="list-style-type: none"> - Susunan dan Tatakerja - Tatatertib Kantor termasuk Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai - Pelayanan Publik b. Organisasi <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Badan Non Pemerintah - Organisasi Badan Internasional - Organisasi Semi Pemerintah c. Kelembagaan d. Ketatalaksanaan <ul style="list-style-type: none"> - Tata Naskah Dinas - Stempel Dinas dan Stempel Jabatan - Papan Nama Instansi Pemerintah/Non Pemerintah - Alamat-alamat Kantor dan Pejabat - Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut d. Tata Hubungan Kerja e. Standart Operasional Prosedur f. Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan g. Analisis Jabatan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Organisasi/SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran/Penilaian Beban Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional - Uraian Jabatan h. Kinerja Aparatur <ul style="list-style-type: none"> - Reformasi Birokrasi - SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 								
15	070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN <ul style="list-style-type: none"> a. Riset meliputi Perijinan bagi Peneliti, Riset Design, Pembahasan sampai dengan Laporan Akhir Riset b. Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> - Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) - SINAS (Sistem Inovasi Nasional) - SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi Cluster, Kabupaten/ Kota, Desa Inovatif - Inkubator Teknologi dan Bisnis - Pameran Produk Inovasi/Ristek - BTC (Bisnis Teknologi Center) - Rapterk (Penerapan Iptek) - HKI (Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual) c. Kajian <ul style="list-style-type: none"> - Kajian Stretegis/Diskusi/ Forum Group Discussion (FGD) - Seminar - Workshop - Rapat Koordinasi/Rapat Teknis - Lokakarya - Diseminasi/Sosialisasi Hasil Penelitian d. Kerjasama Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah - Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta - Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat - Lembaga Internasional e. Perekayasaan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Bappeda, Bidang Penelitian dan Pengembangan/ SKPD, Sekretariat/RSUD, Bagian Tata Usaha/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		f. Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) g. Publikasi Ilmiah - Jurnal Ilmiah								
16	080	KONFERENSI/RAPAT KOORDINASI a. Gubernur b. Bupati/Walikota c. Komponen, Eselon lainnya termasuk Pimpinan SKPD d. Instansi lainnya di Luar Kemendagri e. Internasional di Dalam Negeri f. International di Luar Negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Semua Bagian/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
17	090	PERJALANAN DINAS a. Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah b. Perjalanan Menteri ke Daerah c. Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I) d. Perjalanan PNS meliputi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas e. Perjalanan Tamu Asing ke Daerah f. Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri g. Perjalanan Menteri ke Luar Negeri h. Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri i. Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Semua Bagian/ SKPD, Sekretariat/ Pemerintah Desa, Sekretariat
18	100	PEMERINTAHAN								
19	110	PEMERINTAHAN PUSAT a. Presiden meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan - Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR - Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan b. Wakil Presiden meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan c. Susunan Kabinet	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		h. Badan-Badan Pertimbangan Daerah meliputi Muspida	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		i. Pembentukan/Pemekaran - Pembentukan Daerah Otonom - Pembentukan Wilayah - Perubahan Batas Wilayah - Pemekaran Wilayah - Penambahan Ibu Kota Provinsi - Pemindahan Ibu Kota Provinsi - Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		j. Pembagian Wilayah	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		k. Penyerahan Urusan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
21	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA								
		a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		c. Monografi	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		d. Koordinasi								
		- Satuan Kerja Perangkat Daerah	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Instansi Vertikal	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Kerjasama antar Provinsi/ Daerah, dan Luar Negeri (<i>Sister City</i>)	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		e. Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		f. Wakil Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		g. Sekretaris Daerah meliputi Pencalonan dan Serah Terima Jabatan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		h. Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah meliputi Muspida	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		i. Pembentukan Daerah - Pembentukan Daerah Otonom	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/ Pemerintah Desa, Seksi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a. Pamong Desa meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pelantikan, Serah Terima, Penghasilan dan sebagainya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dispermades, Semua Bidang/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes/Kel)	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		c. Kekayaan Desa: Bondo Desa, Tanah Bengkok dan lain-lain	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		d. Lembaga Tingkat Desa: Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		e. Administrasi Desa/Kelurahan: Monografi, Peta Rupa Bumi dan lain-lain	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		f. Kewilayahan								
		- Pembentukan Desa/Kelurahan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Pemekaran Desa/Kelurahan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Dispermades, Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Perubahan Nama Desa/ Kelurahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Semua Bidang di Dispermades/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Permasalahan Batas Desa/Kelurahan	Rahasia	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Dispermades, Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Penyatuan Desa/Kelurahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Semua Bidang di Dispermades/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Penghapusan Desa/Kelurahan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		g. RT-RW	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
23	150	LEGESLATIF MPR/DPR/DPD								
		a. Keanggotaan MPR								
		- Pencalonan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	Sekretariat DPRD, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan/Pemerintah Desa, Seksi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan - Pemberhentian (<i>Recall</i>, Meninggal) - Pelanggaran 	<p>sda sda</p> <p>Rahasia</p>	<p>sda sda</p> <p>√</p>	<p>sda sda</p> <p>-</p>	<p>sda sda</p> <p>√</p>	<p>sda sda</p> <p>-</p>	<p>sda sda</p> <p>√</p>	<p>Kabupaten Magelang sda sda</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang</p>	<p>Kesejahteraan sda sda</p> <p>Sekretariat DPRD, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Pergantian antar Waktu 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang</p>	<p>Sekretariat DPRD, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan</p>
		<p>b. Keanggotaan DPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencalonan - Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah - Pemberhentian (<i>Recall</i>, Meninggal) - Pelanggaran - Pergantian antar Waktu 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		<p>c. Keanggotaan DPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencalonan - Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		<p>d. Persidangan</p>	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		<p>e. Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keuangan - Penghargaan - Pemberhentian 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		<p>f. Hak</p>	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		<p>g. Jawaban Pemerintah</p>	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		<p>h. Peninjauan/Kunjungan Lapangan</p>	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		<p>i. Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi</p>	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
24	160	<p>DPRD PROVINSI</p> <p>a. Keanggotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencalonan - Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah - Pelanggaran - Pemberhentian antar Waktu (Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, Diberhentikan) 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang</p>	<p>Sekretariat DPRD, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Alat Kelengkapan Lain (Pansus)) b. Persidangan <ul style="list-style-type: none"> - Rapat-Rapat - Fraksi - Tata Tertib - Kode Etik - Reses - Peninjauan/Kunjungan Lapangan - Kunjungan Kerja/Studi Banding/Konsultasi c. Kesejahteraan <ul style="list-style-type: none"> - Keuangan - Penghargaan d. Hak 								
25	170	<p>DPRD KABUPATEN/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keanggotaan <ul style="list-style-type: none"> - Pencalonan - Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah - Pelanggaran - Pemberhentian antar Waktu - Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Alat Kelengkapan Lain (Pansus)) b. Persidangan <ul style="list-style-type: none"> - Rapat-Rapat - Fraksi - Tatatertib - Kode Etik - Reses - Peninjauan/Kunjungan Lapangan - Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi c. Kesejahteraan <ul style="list-style-type: none"> - Keuangan - Penghargaan d. Hak 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD, Bidang Persidangan dan Perundang-undangan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Penuntutan Khusus k. Hukum Adat l. Hak Asasi Manusia	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda
27	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI a. Perwakilan Asing b. Tamu Negara c. Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing d. Perwakilan RI di Luar negeri e. PBB f. Laporan Luar Negeri	Biasa/Terbuka sda Terbatas Biasa/Terbuka sda sda	√ sda √ √ sda sda	√ sda - √ √ sda sda	√ sda √ √ sda sda	√ sda - √ √ sda sda	√ sda √ √ sda sda	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda sda sda	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan sda Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan sda sda
28	200	POLITIK Perencanaan dan Program Pembinaan Luar Negeri a. Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara b. Kesatuan Bangsa c. Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporrannya d. Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporrannya e. Keadaan Politik Luar Negeri f. Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbudhankam g. Orde Baru h. Orde Reformasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Kabupaten Magelang	Kesbangpol, Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional/Pemerintah Desa, Seksi
29	210	KEPARTAIAN a. Partai Politik - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol - Program Kerja, Data Kegiatan Parpol - Pembinaan Parpol	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Kesbangpol, Seksi Politik Kewaspadaan Nasional/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Munas/Musda Parpol - Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan Parpol - Data Inventaris dan Keuangan Parpol <p>b. Partai/Organisasi Terlarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Pembubaran Partai/Organisasi Terlarang - Daftar dan Data Pengurus Anggota Partai/Organisasi Terlarang - Ijin Meninggalkan Tempat/ Domisili bagi Anggota Partai/ Organisasi Terlarang - Daftar Berkala mengenai Keadaan Anggota Partai/ Organisasi Terlarang - Laporan Umum mengenai Keadaan Anggota Partai/ Organisasi Terlarang 	Rahasia	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Kesbangpol, Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
30	220	<p>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p> <p>a. Pembentukan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi - Program Kerja Organisasi - Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota <p>b. Pembinaan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya - Daftar Inventaris Kekayaan Nasional 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Kesbangpol, Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
31	230	<p>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</p> <p>a. Pembentukan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi - Program Kerja Organisasi - Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota <p>b. Pembinaan Organisasi</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Kesbangpol, Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya - Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi 								
32	240	<p>ORGANISASI PEMUDA</p> <p>a. Pembentukan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi - Program Kerja Organisasi - Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota <p>b. Pembinaan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya - Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Kesbangpol, Seksi Politik dan dan Kewaspadaan Nasional/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
33	250	<p>ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN</p> <p>a. Pembentukan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi - Program Kerja Organisasi - Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota <p>b. Pembinaan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya - Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Distanpangan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
34	260	<p>ORGANISASI WANITA</p> <p>a. Pembentukan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi - Program Kerja Organisasi - Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota <p>b. Pembinaan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya - Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Kesbangpol, Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	270	PEMILIHAN UMUM (PEMILU), PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) a. Pencalonan b. Nomor Urut/Tanda Gambar c. Kampanye - Dana Kampanye - Jadwal Kampanye d. Petugas Pemilu - Laporan Pelaksanaan Tugas - Laporan Keuangan e. Pemilih/Daftar Pemilih f. Sarana - TPS - Kendaraan - Surat Suara - Kotak Suara g. Pemungutan Suara/Penghitungan h. Hasil Pemilu - Penetapan Terpilih dan Pembagian Kursi Anggota Legislatif - Penetapan Pemenang Pilkada i. KPU/KPUD	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Kecamatan Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
36	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA a. Pemantauan b. Pelanggaran c. Sengketa d. Panwaslu	Biasa/Terbuka Terbatas sda Biasa/Terbuka	√ √ sda √	√ - sda √	√ √ sda √	√ - sda √	√ √ sda √	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip sda Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Kecamatan Pemerintah Desa Desa, Seksi Kesejahteraan Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Kecamatan Pemerintah Desa Desa, Seksi Kesejahteraan sda Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Kecamatan Pemerintah Desa Desa, Seksi Kesejahteraan
37	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM a. Kebijakan Pemerintah mengenai Situasi dan Kondisi Keamanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	Satpol PP dan PK, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Pemerintah Desa, Seksi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Pembinaan dan Pengaturan mengenai Larangan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	Kabupaten Magelang sda	Pemerintahan sda
		c. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan/Ancaman Keamanan/Ketertiban Umum	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		d. Program Kerja serta Tatacara Penanggulangan Keamanan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		e. Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan Keteriban Umum (Trantibum)	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		f. Pengawasan Trantibum	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		g. Penegakan Pelaksanaan Perda	Rahasia	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		h. Pembinaan/Penyuluhan Pelanggaran Perda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		i. Patroli Wilayah	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		j. Laporan Kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing - Pengamanan - Pengawasan	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		h. Pemberitahuan Keadaan Bahaya dan Jam Malam meliputi Pemberitahuan, Kententuan Pelaksanaan dan Pengawasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
38	310	PERTAHANAN a. Darat b. Laut c. Udara d. Ketahanan Bangsa e. Ketahanan Ekonomi f. Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Rahasia	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
39	320	KEMILITERAN/TNI a. Latihan Militer	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang	Satpol PP dan PK, Bidang Penegakan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Wajib Militer c. Operasi Militer d. Kekayaan TNI e. Kemanunggalan TNI dengan Rakyat							mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Perundang-undangan Daerah/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
40	330	KEAMANAN a. Kepolisian - Polisi Pamong Praja b. Huru-hara/Demonstrasi c. Senjata Api/Tajam d. Bahan peledak e. Perjudian/Miras f. Surat-surat Kaleng g. Pengaduan Masyarakat h. Himbauan atau Larangan i. Ijin Keramaian, SKCK, SIM	Terbatas sda sda sda sda sda Biasa/Terbuka sda sda	√ sda sda sda sda √	- sda sda sda sda √	√ sda sda sda sda √	- sda sda sda sda √	√ sda sda sda sda √	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda sda sda sda Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda sda	Satpol PP dan PK, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan sda sda sda sda Satpol PP dan PK, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan sda sda
41	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) a. Kebijakan Pemerintah mengenai Pembentukan Linmas b. Pembinaan dan Diklat - Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Linmas - Pendidikan/Latihan Linmas - Pelatihan PAM Swakarsa - Pendidikan/Latihan MENWA c. Pengerahan dan Pengendalian Linmas d. Kesejahteraan bagi Anggota Linmas - Pemberian Tali Asih bagi Anggota Linmas - Bantuan Modal Usaha bagi Anggota Linmas - Santunan Uang Duka bagi Anggota Linmas - Penghargaan bagi Anggota Linmas e. Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		h. Investigasi/Penyelidikan Kecelakaan i. Asuransi Kecelakaan	sda Biasa/Terbuka	sda √	sda √	sda √	sda √	sda √	yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip sda Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan sda BPBD, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
45	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI a. Perencanaan - Perencanaan Teknis - Rekomendasi b. Bantuan Bencana c. Penanggulangan Bencana dengan Pihak Lain d. Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi e. PUSDALOP f. Kunjungan Lapangan g. Relawan h. Laporan Bencana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	BPBD, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
46	390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN a. Instansi Pemerintah Pusat b. Instansi Pemerintah Daerah c. Lembaga Internasional d. Lembaga Non Pemerintah Nasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPBD, Semua Bidang/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
47	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dalam Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dispermades, Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
48	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN a. Gotong-Royong - Swadaya Gotong Royong (Pembinaan, Pungutan) - Lembaga Sosial Desa (LSD) - Latihan Kerja Masyarakat - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Penyuluhan Masyarakat Desa - Kelembagaan Desa - Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dispermades, Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk - Keracunan Makanan - Menu Makanan Rakyat - Gondok Endemik (GAKI)							mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Pengendalian Penyakit/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
	f.	RSU, RSJ, RS Khusus								
		- Pelayanan Medis termasuk Surat Keterangan, Berkaitan dengan Kondisi Pasien, Visum (Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD, IBS, ICU, Medical Check UP (MCU))	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Dinkes, Sekretariat/RSUD, Bidang Pelayanan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		- Penunjang Medis (Farmasi, Rekam Medik, Radiologi, Gizi, Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik, Bank Darah Rumah Sakit, Sanitasi Rumah Sakit, CSSD/Laundry)	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Keperawatan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Komite Medik	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Satuan Pengawas Internal (SPI)	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Mutu Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	√	RSUD, Bidang Pelayanan/ Dinkes, Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		- Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)	Biasa/Terbuka	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Promosi Layanan Kesehatan	Biasa/Terbuka	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		- Kasus Hukum Rumah Sakit	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	RSUD, Bagian Tata Usaha/ Dinkes, Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
	g.	Tenaga Medis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	RSUD, Bagian Tata Usaha/ Dinkes, Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		- Perencanaan Tenaga Medis								
		- Pendayagunaan Tenaga Medis (Perijinan untuk Tenaga Medis, Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI))								
		- Diklat Tenaga Kesehatan/ Medis								
		- Diklat Tenaga Kesehatan/ Paramedis								
		- Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk Pendidikan Spesialis								
	h.	Peralatan Kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki	RSUD, Bidang Penunjang/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi - Penyimpanan - Distribusi - Perijinan Berkaitan dengan Alat Kesehatan <p>i. Pengobatan Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pijat - Akupuntur - Jamu dan Herbal - Dukun <p>j. Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas dan Puskesmas Keliling - Poliklinik dan Balai Kesehatan - Rumah Bersalin - Posyandu - Laboratorium Kesehatan - Apotek - Sanatorium Kesehatan - Instalasi Farmasi - Pusat Informasi Manajemen Kesehatan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinkes, Bidang Pelayanan Kesehatan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinkes, Bidang Pelayanan Kesehatan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinkes, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Sumber Daya Manusia/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
52	450	<p>AGAMA</p> <p>a. Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan</p> <p>b. Bantuan di Bidang Keagamaan</p> <p>c. Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peribadatan (Sholat, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Puasa, Umroh dan Haji) - Rumah Ibadat (Masjid, Musholla, Surau) - Tokoh Agama - Pendidikan Agama - Wakaf - Mazhab Agama Islam - Organisasi Keagamaan - Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i) <p>d. Kristen Protestan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peribadatan - Rumah Ibadah Gereja dan lain-lain - Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dan lain-lain) - Mazhab Agama Kristen Protestan - Organisasi Gerejani 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Kesejahteraan Rakyat/Pemerintah Desa, Seksi Pelayanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Hidup Perempuan (Perlindungan Perempuan, Ibu Teladan, Pengarusutamaan Gender (PUG)) 								
		<ul style="list-style-type: none"> d. Keperintisan dan Kepahlawanan <ul style="list-style-type: none"> - Pahlawan - Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan - Cacat Veteran 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinsos PPKB & PPPA, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Lanjut Usia - Korban Kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi - Masyarakat Miskin: Raskin, BLT dan lain-lain 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dinsos PPKB & PPPA, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		f. Sumbangan Sosial	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		g. Bimbingan Sosial	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		h. P M I	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		<ul style="list-style-type: none"> i. M a k a m <ul style="list-style-type: none"> - U m u m - Pahlawan - Khusus, Keluarga, Raja - Krematorium 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
54	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
		a. Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kependudukan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disdukcapil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintah
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pendaftaran Penduduk <ul style="list-style-type: none"> - Identitas Penduduk - Perpindahan Penduduk - Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan 	Rahasia	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disdukcapil, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pencatatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> - Kelahiran Kematian dan Advokasi (Kelahiran, Kematian, Advokasi) 	Rahasia	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disdukcapil, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Perkawinan, Perceraian dan Advokasi - Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi - Pencatatan Kewarganegaraan (Akibat Perkawinan, Akibat Kelahiran, Non Perkawinan/ Non Kelahiran, Naturalisasi, Perubahan WNI ke WNA) 								
		<p>d. Informasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Informasi - Pengolahan Data Kependudukan - Pelayanan Informasi Kependudukan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disdukcapil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan Dinsos PPKB & PPPA, Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Pangan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		<p>e. Perkembangan Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan Kualitas Penduduk (Struktur Jumlah, Komposisi, Fertilitasi, Kesehatan Reproduksi, Morbiditas Penduduk, Mortalitas Penduduk) - Pengembangan Kuantitas Penduduk (Anak dan Remaja, Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Gender) - Penataan Persebaran Penduduk (Migrasi antar Wilayah, Urbanisasi) - Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk - Pengembangan Wawasan Kependudukan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	
		<p>f. Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan Informasi Daerah Transmigrasi - Pemukiman Transmigrasi - Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan - Penampungan Transmigrasi (transito), dan Pelatihan Transmigran - Pembinaan Masyarakat Transmigrasi 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disperinaker, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		<p>g. Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kontrasepsi 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang	Dinsos PPKB & PPPA, Bidang Keluarga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri - Penyuluhan Lapangan KB (PLKB) - Pos KB Desa - Akseptor KB 							mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Berencana/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
55	480	<p>MEDIA MASA</p> <p>a. Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Media Massa</p> <p>b. Media Cetak meliputi Perijinan hingga Pencabutan Ijin apabila terjadi Pelanggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Kabar - Majalah - Buletin - Jurnal - Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik - Layanan Informasi/Leaflet - Masukan Analisis Gubernur <p>c. Media Elektronik meliputi Perijinan hingga Pencabutan Ijin apabila terjadi Pelanggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio - Televisi - Film Dokumenter - Pengawasan Lembaga Penyiaran - Kelompok Pemantau Isi Siaran - Pengkajian Isi Siaran - SDM Penyiaran <p>d. Periklanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pemasangan Reklame - Pameran <p>e. Kewartawanan/Jurnalistik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Organisasi Profesi - Kasus-Kasus Kewartawanan <p>- Penyalahgunaan Profesi</p> <p>- Bantuan kepada/dari Organisasi Profesi Wartawan</p>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Humas dan Protokol/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Humas dan Protokol/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Setda, Bagian Humas dan Protokol/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan								
56	500	PEREKONOMIAN a. Dewan Stabilitas b. Pengadaan Pangan c. Pengadaan Sandang d. Perizinan pada umumnya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ sda sda sda	√ sda sda sda	√ sda sda sda	√ sda sda sda	√ sda sda sda	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda sda sda	Setda, Bagian Perekonomian/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan sda sda sda
57	510	PERDAGANGAN a. Promosi Perdagangan - Pekan Raya - Iklan - Pameran - <i>Event-event</i> - Lomba-Lomba (Lomba Desain, Busana, Kerajinan) b. Pelelangan, Distribusi - Pemasaran Sembako - Pemasaran Hasil Industri - Penentuan Harga Pokok c. Bina Usaha dan Sarana Perdagangan - Rencana dan Program Kerja - Pelaksanaan Pelayanan Administrasi - Pelaksanaan Teknis - Pemantauan - Evaluasi dan Pelaporan d. Perijinan HO, Gangguan, Reklame dan lain-lain - Penerbitan SIUP - Perpanjangan - Ijin Prinsip - Rekomendasi e. Perdagangan antar Pulau - Kerjasama Bahan Baku - Industri Pemasaran - Kontrak f. Tera - Tera dan Tera Ulang - Takaran - Timbangan	Biasa/Terbuka sda sda sda sda Terbatas Biasa/Terbuka	√ sda sda sda sda √ √	√ sda sda sda sda - √	√ sda sda sda sda √	√ sda sda sda sda -	√ sda sda sda sda √	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda sda sda sda Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	Disdagkop dan UKM, Bidang Pasar, Bidang Perdagangan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan sda sda sda sda Disdagkop dan UKM, Bidang Pasar, Bidang Perdagangan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Kalibrasi - Cap Tanda Tera - Biaya Tera 							Kabupaten Magelang	
		g. Bantuan Peralatan <ul style="list-style-type: none"> - Proposal - Surat Perjanjian/Kontrak - Serah Terima 	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disdagkop dan UKM, Bidang Pasar, Bidang Perdagangan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		h. Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disdagkop dan UKM, Bidang Pasar dan Perdagangan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		i. Kemetrolagian <ul style="list-style-type: none"> - Standar Tingkat Tiga - Standar Kerja Satuan Ukuran - Ukuran Metrologi 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		j. Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> - Sembilan Bahan Pokok - P a s a r - Pertokoan, Kali Lima, Kios - Pusat Perbelanjaan 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		k. Ekspor <ul style="list-style-type: none"> - Ekspor Hasil Industri - Ijin Ekspor - Pengembangan Pasar Luar Negeri - Managemen Perdagangan Internasional - Ekspor Hasil Industri - Pemberitahuan Ekspor Barang - Pengawasan Mutu Barang - Eksportir Terdaftar - Evaluasi dan Pelaporan 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		l. Impor <ul style="list-style-type: none"> - Ijin Impor - Standar Mata Dagang Impor - Managemen Perdagangan Internasional - Kegiatan Impor - Faktor-Faktor Pendukung - Pengawasan Mutu Barang Impor - Penyaluran Kegiatan Impor - Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		m. Perdagangan antar Pulau <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Bahan Baku - Industri Pemasaran - Kontrak 	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disdagkop dan UKM, Bidang Pasar, Bidang Perdagangan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Hama dan Penyakit - Konservasi dan Suaka Laut d. Peternakan dan Kesehatan Hewan <ul style="list-style-type: none"> - Produksi - Usaha Peternakan - Kesehatan Hewan - Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan - Laboratorium Kesehatan Hewan - Inseminasi Buatan - Pembibitan dan Budi Daya Ternak e. Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Program dan Pelaporan - Produksi - Usaha Perkebunan - Perlindungan tanaman - Alat dan mesin Perkebunan - Pengolahan Lahan f. Ketahanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Program Bimbingan Massal - Pengembangan Sarana Sumber Daya - Agribisnis - Distribusi Pangan - Kewaspadaan dan Keaneragaman Pangan g. Penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia - Kelembagaan - Penyelenggaraan Penyuluhan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Dispeterikan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPT BBT, UPT BKTI/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	√	Distanpangan, Bidang Ketahanan Pangan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Distanpangan, Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
59	530	PERINDUSTRIAN <ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang Gangguan b. Iklim Usaha dan Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> - Industri Manufaktur - Industri Agro - Industri Unggulan Berbasis Teknologi - Industri Kecil dan Menengah c. Promosi Industri <ul style="list-style-type: none"> - Industri Manufaktur - Industri Agro - Industri Unggulan Berbasis - Industri Kecil dan Menengah d. Standarisasi dan Sertifikasi 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disperinaker, Bidang Industri/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri Manufaktur - Industri Agro - Industri Unggulan Berbasis - Industri Kecil dan Menengah e. Industri Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Industri Manufaktur - Industri Agro - Industri Unggulan Berbasis - Industri Kecil dan Menengah f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri 								
60	540	<p>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minyak dan Gas Bumi <ul style="list-style-type: none"> - Pengusahaan - Penyaluran - Tangki, Pompa, Tanker b. Energi <ul style="list-style-type: none"> - Energi Alternatif - Konservasi Energi - Pemetaan Energi - Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED) c. Pertambangan, Mineral dan Batu Bara <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) - Rekomendasi Teknis - Perijinan - Pembinaan - Pengawasan - Pasca Tambang d. Air Tanah <ul style="list-style-type: none"> - Cekungan Air Tanah (CAT) - Rekomendasi Teknis - Sumur Artesis - Sumur Bor - Sumur Gali (Pasak) - Pengusaha Pengebor (APATINDO) - Sumur Pantau - Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air - Hidrologi e. Geologi <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan - Mitigasi Bencana Geologi - Vulkanologi - Hidrogeologi 							Kewenangan Pemerintah Provinsi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Gerakan Tanah (Longsor, Amblesan) - Pengawasan, Pengendalian f. Hidrologi g. Kesamudraan h. Penghematan Energi								
61	550	PERHUBUNGAN								
		a. Perhubungan Darat - Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau - Angkutan Jalan Raya - Angkutan Sungai - Angkutan Danau - Perkereta-apian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kabupaten Magelang	Dinas Perhubungan, Semua Bidang/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		b. Pos - Pembinaan - Pelayanan - Perijinan - Gangguan Sarana dan Prasarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Umum/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		c. Teknologi Informasi - Kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Diskominfo, Bidang Komunikasi, dan Informasi Publik/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		- Peralatan	Rahasia	√	√	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Diskominfo, Bidang Komunikasi, dan Informasi Publik/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		- Sistem	Rahasia	√	√	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Diskominfo, Bidang Komunikasi, dan Informasi Publik/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		- Pembinaan/Penertiban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Diskominfo, Bidang Komunikasi, dan Informasi Publik/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		- Perijinan	Rahasia	√	√	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Diskominfo, Bidang Komunikasi, dan Informasi Publik/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
		d. Pariwisata dan Rekreasi - Usaha Pariwisata	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang	Disparpora, Bidang Destinasi dan Industri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional - Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Propinsi - Kebutuhan Fisik Minimum - Perhitungan Upah Kerja (termasuk di dalamnya Upah Lembur) - Laporan Data <i>Remittance</i> - Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW 								
	i.	<ul style="list-style-type: none"> Penempatan <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan Tenaga Kerja Sarjana (TKS) - Penempatan Tenaga Kerja Sarjana (TKS) - Penempatan Tenaga Kerja Non Terdidik dan Non Profesional - Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja - Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) - Lembaga Penyalur Tenaga Kerja - Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker antar Kerja Lokal/Daerah dan antar Kerja Negara (AKAN) - Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKK/BKK) - Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS) 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
	j.	<ul style="list-style-type: none"> Latihan Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Pekerja - Sarana dan Prasarana Latihan Kerja - Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disperinaker, UPT Dinas/ Pemerintah Desa, Seksi Pelayanan
	k.	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Sukarela <ul style="list-style-type: none"> - Butsi - Padat Karja 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Disperinaker, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Pemerintah Desa, Seksi Pelayanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1. Perselisihan Pekerja - Perselisihan dan Perkara Hukum Naker m. Keselamatan Kerja - Instansi Proteksi Kebakaran - Pemakaian Alat Keselamatan Kerja - Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Berkerja - Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja - Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes - Gangguan Lingkungan Tempat Usaha - Perlengkapan Sarana Kerja - Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (<i>Sift</i> Malam) n. Pemutusan Hubungan Kerja - Pengaduan PHK Sepihak - PHK Masal - Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK - Ijin Melakukan PHK - Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK - Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang di PHK - Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK o. Kesejahteraan Pekerja - Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja bagi Tenaga Kerja - Perumahan Pekerja - Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek - Koperasi Pekerja - Sarana Transportasi Pekerja - Perpustakaan Pekerja - Tempat Ibadah Pekerja - Rekreasi dan Olah Raga Pekerja - Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja p. Tenaga Kerja Orang Asing	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda Kewenangan Pemerintah Provinsi sda sda sda sda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		i. Moneter	sda	sda	sda	sda	sda	sda	Arsip sda	sda
65	590	AGRARIA								
		a. Tata Guna Tanah - Pemetaan dan Pengukuran - Perpetaan - Penyediaan Data, Peta dan Publikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Fakta Tata Guna Tanah - Tanah Kritis								
		b. Landreform - Redistribusi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD, Bidang Aset/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Ganti Rugi	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD, Bidang Aset/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Bagi Hasil - Gadai Tanah - Bimbingan dan Penyuluhan	sda sda Biasa/Terbuka	sda sda √	sda sda √	sda sda √	sda sda √	sda sda √	sda sda Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	sda sda BPPKAD, Bidang Aset/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Pengembangan - Yayasan Dana Landreform (YDL)	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda	sda sda
		c. Pengurusan Hak-Hak Tanah - Perorangan - Hak Milik - Hak Pakai - Guna Usaha - Hak Guna Bangunan - Hak Pengelolaan - Sengketa Tanah - Pencabutan dan Pembebasan Tanah	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		d. Pendaftaran Tanah - Pengukuran/Pemetaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Setda, Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintah Desa, Seksi Pemerintahan
		- Dana Pengukuran (Permen Angraria No. 6/1960) - Sertifikat	sda Terbatas	sda √	sda -	sda √	sda -	sda √	sda Memiliki dampak	sda Setda, Bagian Tata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Air/Sanitasi - Instalasi Pengatur Udara - Instalasi Akustik - Instalasi Cahaya/Penerangan d. Konstruksi Pencegahan <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi Pencegahan terhadap Kebakaran - Konstruksi Pencegahan terhadap Gempa - Konstruksi Pencegahan terhadap Angin/Udara/Panas - Konstruksi Pencegahan terhadap Kegaduhan - Konstruksi Pencegahan terhadap Gas/<i>Explosive</i> - Konstruksi Pencegahan terhadap Serangga - Konstruksi Pencegahan terhadap Radiasi Atom 								
67	610	PENGAIRAN <ul style="list-style-type: none"> a. Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Waduk - Bangunan Pengambilan - Bangunan Pembawa - Bangunan Pembuangan - Bangunan Lainnya (Jalan, Jembatan, Tangga Cuci, Kubangan Kerbau, Waduk Lapangan, Bangunan Penunjang, Jaringan Telepon, Stasiun Argo, Bangunan TPI dan Pasar Ikan) b. Polder <ul style="list-style-type: none"> - Tanggul Keliling - Bangunan Pembawa - Bangunan Pembuangan - Bangunan Lainnya (Bangunan Pengukur Debit Air, Bangunan Pengukur Curah Hujan, Bangunan Gudang Stasiun Pompa, Bangunan, Listrik Stasiun Pompa, Rumah Petugas Eksploitasi) c. Pasang Surut <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Pembawa - Bangunan Pembuangan - Bangunan Lainnya (Kolom Pasang, Saluran, Bangunan Penangkap Kotoran, Bangunan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DPU dan PR, Bidang Pengairan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengukur Muka Air, Bangunan Pengukur Curah Hujan, Jalan, Jembatan) d. Pengendalian Sungai - Bangunan Pengaman - Saluran Pengaman - Bangunan Lainnya (<i>Warning System</i> , Stasiun) e. Pengamanan Pantai - Tanggul - Krib - Bangunan Lainnya f. Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai) - Stasiun Pompa - Bangunan Pembawa - Bangunan Pembuangan - Bangunan Lainnya								
68	620	JALAN a. Jalan Kota/Kabupaten - Daerah Penguasaan - Bangunan Sementara - Badan Jalan - Perkerasan - Drainase - Buku Trotoir - Medium - Daerah Sampingan - Bangunan Pelengkap dan Pengaman b. Jalan Provinsi - Daerah Penguasaan - Badan Jalan - Perkerasan (<i>Pavement</i>) - Drainage - Trotoir - Medium - Daerah Samping - Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan c. Jalan Nasional - Daerah Penguasaan - Badan Jalan - Perkerasan (Lapis Pondasi, Lapis Permukaan) - Drainase (Gorong-gorong, Parit) - Median - Daerah Samping (Pagar, Tanaman)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DPU dan PR, Bidang Bina Marga/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Bangunan Pelengkap dan Pengamanan (Rambu-rambu)								
69	630	<p>JEMBATAN</p> <p>a. Jembatan pada Jalan Kota/Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah Penguasaan - Bangunan Sementara - Pekerjaan Tanah (<i>Earth Work</i>) - Pondasi - Bangunan Bawah - Bangunan - Bangunan Pengaman - Bangunan Pelengkap - Oprit <p>b. Jembatan pada Jalan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah Penguasaan - Bangunan Sementara - Pekerjaan Tanah (<i>Earth Work</i>) - Pondasi - Bangunan Bawah - Bangunan - Bangunan Pengaman - Bangunan Pelengkap - Oprit <p>c. Jembatan pada Jalan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah Penguasaan (Tanah, Tanaman, Bangunan) - Bangunan Sementara (Gudang Proyek, Kantor Proyek) - Pondasi - Bangunan Bawah - Bangunan (Gelagar, Lantai, Sandaran, Perkerasan) - Bangunan Pengamanan (Bronjong Strek Dam, Krib) - Bangunan Pelengkap dan Pengaman (Rambu-rambu) 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DPU dan PR, Bidang Bina Marga/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
70	640	<p>BANGUNAN</p> <p>a. Bangunan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Pengadilan - Rumah Pejabat Negara - Gedung DPR - Gedung Balai Kota - Penjara - Perkantoran <p>b. Bangunan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Kanak-Kanak 	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	DPU dan PR, Bidang Cipta Karya/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<ul style="list-style-type: none"> <i>Density)</i> - Kepadatan Tinggi (<i>High Density</i>) - Kepadatan Sedang (<i>Medium Density</i>) - IMB d. Daerah Industri <ul style="list-style-type: none"> - Industri Berat - Industri Ringan - Industri Rumah (<i>Home Industry</i>) e. Daerah Rekreasi (<i>Open Space</i>) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Public Garden</i> - <i>Sport & Playing Fields</i> - <i>Open Space</i> f. Transportasi (Tataletak) <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jalan - Jaringan Kereta Api - Jaringan Sungai g. <i>Assineering</i> <ul style="list-style-type: none"> - Saluran Pengumpulan - Instalasi Pengolahan h. Kesehatan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Persampahan - Pengotoran Udara - Pengotoran Air - Kegaduhan - Kebersihan Kota 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DLH, Bidang Kebersihan dan Pertamanan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan	
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DLH, Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan	
72	660	TATA LINGKUNGAN									
		a. Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DLH, Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan	
		b. Kebersihan Lingkungan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DLH, Bidang Kebersihan dan Pertamanan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan	
		c. Pencemaran <ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran Air - Pencemaran Udara - Pencemaran Tanah 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	DLH, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) d. Kerusakan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Konservasi Pesisir dan Laut - Konservasi Sumber Daya Alam e. Pentaatan Hukum Lingkungan f. Laboratorium Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Air - Udara - Tanah g. Analisis Dampak Lingkungan h. Pengembangan Teknologi Lingkungan i. Pengembangan Kapasitas j. Pengamanan Lingkungan 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Kabupaten Magelang Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DLH, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan DLH, Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan DLH, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan DLH, Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	sda sda sda	sda sda sda
73	670	KETENAGAAN <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) b. Listrik <ul style="list-style-type: none"> - Kelistrikan - Pembangkit Tenaga Listrik - Transmisi Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik - Pengusahaan Listrik c. Tenaga Air d. Tenaga Minyak e. Tenaga Gas f. Tenaga Matahari g. Tenaga Nuklir h. Tenaga Panas Bumi i. Tenaga Uap j. Tenaga Lainnya 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Kewenangan Pusat
74	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	DPU dan PR, Semua Bidang/ Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan Pemerintah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	690	AIR MINUM a. Intake - Broncaptering/Bak Penangkap Mata Air - Sumur - Bendungan - Saringan (<i>Screen</i>) - Pintu Air - Saluran Pembawa - Alat Ukur - Perpompaaan b. Transmisi Air Baku - Perpipaan - Katup Udara (<i>Air Rolief</i>) - Tutup Penguras (<i>Blow off</i>) - Bak Pelepas Tekanan - Jembatan Pipa - Syphon c. Instalasi Pengelolaan - Bangunan Ukur - Bangunan Aerasi - Bangunan Pengendapan - Bangunan Pembubuh Bahan Kimia - Bangunan Pengaduk - Bangunan Saringan - Perpompaaan - <i>Clear Hell</i> d. Distribusi - Reservoir Menara Bawah Tanah - Perpipaan - Perpompaaan - Jembatan Pipa - <i>Syphon</i> - Hydran - Katup - Bak Pelepas Tekanan (<i>Pressuer Reducing Valve</i>)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Kabupaten Magelang Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	DPU dan PR, Bidang Cipta Karya/Pemerintah Desa, Seksi Kesejahteraan
76	700	PENGAWASAN a. Kebijakan dan Program Pengawasan b. Pengawasan Perencanaan Pengadaan/Proyek	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Pengawasan Inventarisasi Asset d. Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana e. Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen f. Pengawasan Penelitian/Riset g. Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi h. Pengawasan Pertanahan/BPN	sda sda sda sda sda sda							
77	710	BIDANG PEMERINTAHAN a. Pengawasan Pemerintahan Provinsi b. Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota c. Pengawasan Pemerintahan Desa	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
78	720	BIDANG POLITIK a. Pengawasan Partai termasuk Pendanaan Partai, Atribut Partai dan lain-lain b. Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbudhankam c. Pengawasan Organisasi meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Wanita, Buruh/Tani dan Kepemudaan d. Pengawasan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
79	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN a. Pengawasan Kesbangpolinmas b. Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
80	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT a. Pengawasan Pembangunan Desa b. Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan c. Pengawasan Kebudayaan d. Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat e. Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) f. Pengawasan Kesejahteraan Sosial g. Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		h. Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran i. Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat								
81	750	BIDANG PEREKONOMIAN a. Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian b. Pengawasan Pertanian dan Perkebunan c. Pengawasan Kehutanan d. Pengawasan Pertambangan/ ESDM e. Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan f. Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian g. Pengawasan PMDN/PMA h. Pengawasan Perbankan/Moneter i. Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
82	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM a. Pengawasan Pengairan b. Pengawasan Jalan c. Pengawasan Jembatan d. Pengawasan Bangunan e. Pengawasan Tata Ruang Kota f. Pengawasan Tata Lingkungan g. Pengawasan Ketenagaan h. Pengawasan Air Minum	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
			sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
83	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
84	780	BIDANG KEPEGAWAIAN a. Pengawasan Pengadaan PNS b. Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS c. Keanggotaan PNS dalam Parpol d. Penyimpangan Pejabat/PNS e. Persengketaan PNS	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
85	790	BIDANG KEUANGAN a. Pengawasan Anggaran b. Pengawasan Akuntansi c. Pengawasan Perbendaharaan	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	Inspektorat/Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d. Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah e. Pengawasan Pendapatan f. Pengawasan Asset								
86	800	KEPEGAWAIAN a. Perencanaan b. Penelitian c. Statistik	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √ √	- √ √	√ √ √	- √ √	√ √ √	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	BKPPD, Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum BKPPD, Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum BKPPD, Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
87	810	PENGADAAN a. Pendaftaran CPNS - <i>Testing</i> - <i>Screening</i> - Pengumuman Tes dan Pemanggilan Calon yang Diterima menjadi CPNS b. Pengujian Kesehatan c. Pengangkatan CPNS - Pengangkatan CPNS Golongan I - Pengangkatan CPNS Golongan II - Pengangkatan CPNS Golongan III	Biasa/Terbuka Terbatas sda	√ √ sda	√ - sda	√ √ sda	√ - sda	√ √ sda	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip sda	BKPPD, Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai/ Pemerintah Desa, Seksi Urusan Tata Usaha dan Umum BKPPD, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir/Pemerintah Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum sda
88	820	MUTASI a. Pengangkatan - Pengangkatan CPNS menjadi PNS - Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, Pembebasan dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pernyataan Menduduki Jabatan, Sumpah Janji - Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, Pemberhentian Sementara, Pengangkatan	Terbatas	√	-	√	-	√	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip	BKPPD, Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Pendidikan dalam Jabatan - Diklatpim - Diklat Teknis - Diklat Fungsional d. Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis e. Pengembangan Pegawai - Tugas Belajar - Ijin Belajar - Tunjangan Belajar - Bantuan Pendidikin - Penempatan Kembali f. Metode - Kuliah - Ceramah, Symposium - Diskusi - Kuliah Lapangan/OL, Widya Wisata, KKN - Kurikulum - Karya Tulis g. Tenaga Pengajar, Narasumber h. Administrasi Pendidikan i. Fasilitasi Pendidikan j. Sarana Pendidikan								Tata Usaha dan Umum
96	900	KEUANGAN a. Nota Keuangan b. APBN c. APBD	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD, Bidang Anggaran/ Pemerintah Desa, Urusan Tata Usaha dan Umum
97	910	ANGGARAN a. Keputusan tentang Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD/PPKD b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis BLUD c. DPA/DPPA/DPAL-SKPD/PPKD d. Anggaran Kas e. Surat Penyediaan Dana (SPD) f. SILPA	Terbatas Biasa/Terbuka sda sda sda sda	√ √ sda sda sda sda	- √ sda sda sda sda	√ √ sda sda sda sda	- √ sda sda sda sda	√ √ sda sda sda sda	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda sda sda sda	BPPKAD, Sekretariat/ Pemerintah Desa, Urusan Keuangan BPPKAD, Sekretariat/ Pemerintah Desa, Urusan Keuangan sda sda sda sda
98	920	AKUNTANSI Laporan-laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD, Bidang Akuntansi/Pemerintah Desa, Urusan Keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	930	PERBENDAHARAAN a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) b. Surat Penolakan Penerbitan SP2D c. Daftar Penguji SP2D	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD Bidang Perbendaharaan/ Pemerintah Desa, Urusan Keuangan
100	940	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN Bintek-bintek/Kursus yang Berkaitan dengan Keuangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD Bidang Perbendaharaan/ Pemerintah Desa, Urusan Keuangan
101	950	PENGELOLAAN KAS DAERAH a. Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPH 21 dari Gaji b. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah c. Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPH) dari CV/PT/Instansi d. Surat Tanda Setoran (STS) e. Laporan Realisasi Daerah - Laporan Realisasi Penerimaan Daerah - Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah f. Rekonsiliasi - Surat Rekonsiliasi Penerimaan - Laporan Rekonsiliasi Bank g. Laporan Mutasi Penempatan Deposito h. Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD Bidang Perbendaharaan/ Pemerintah Desa, Urusan Keuangan
102	960	EVALUASI DAN PENGENDALIAN a. Tuntutan Ganti Rugi b. Tuntutan Perbendaharaan c. Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota d. Evaluasi dan Pertanggungjawaban	Terbatas sda Biasa/Terbuka sda	√ sda √ sda	- sda √ sda	√ sda √ sda	- sda √ sda	√ sda √ sda	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pencipta Arsip sda Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sda	BPPKAD Bidang Perbendaharaan/ Pemerintah Desa, Urusan Keuangan sda BPPKAD Bidang Anggaran/Pemerintah Desa, Urusan Keuangan sda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air Permukaan dan Metrologi - Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah) 								
		e. Bea <ul style="list-style-type: none"> - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air 	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		f. Cukai	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		g. Pungutan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
		h. Bantuan <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Presiden - Bantuan Menteri - Bantuan Gubernur - Bantuan Bupati - Bantuan Lainnya 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD, Bidang Anggaran/ Pemerintah Desa, Urusan Keuangan
		i. Pendapatan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak Dipisahkan - Penerimaan Jasa Giro - Penerimaan Bunga Bank - Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR) - Penerimaan Lain-lain 	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang	BPPKAD, Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak/ Pemerintah Desa, Seksi Keuangan

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001